

LKjIP

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN

SAMBOJA BARAT

Alamat: Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja Barat,
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 7527

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Samboja Barat yang disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Penyusunan LKjIP Kecamatan Samboja Barat didasarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja Barat Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana pertanggung jawaban dan perbaikan kinerja guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Samboja Barat.

Samboja Barat, 12 Februari 2026

Camat,



H. BURHANUDDIN, S.Ag., M.Si

Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 19710330 199702 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat adalah potret penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Samboja Barat dengan prinsip penyelenggaraan pada pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah rangkaian proses untuk menilai pelaksanaan kinerja dengan tolak ukur yang spesifik dan jelas, dalam hal ini mengukur pelaksanaan rumusan perencanaan tujuan dan sasaran strategis organisasi serta hasil yang diperoleh.

Berdasarkan amanat Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan yang ditunjukkan pada capaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) setiap organisasi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Sumber Daya Aparatur	5
1.6 Sumber Daya Keuangan.....	6
1.7 Isu-Isu Strategis.....	6
1.8 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	8
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	9
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	9
2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	11
2.5 Perjanjian Kinerja.....	16
2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2025.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	40
LAMPIRAN	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan ASN Kecamatan Samboja Barat	5
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Visi Misi, Misi, Tujuan, Sasaran	9
Tabel 2.2 Matrik Hubungan Visi Misi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	10
Tabel 2.3 Matrik Hubungan antara Sasaran Strategi dengan Program Tahun 2025	11
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	12
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2025	17
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025	18
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Samboja Barat berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2025.....	32
Tabel 3.3 PADes Kecamatan Samboja Barat.....	
Tabel 3.4 Realisasi Keuangan Samboja Barat 2025.....	
Tabel 3.5 Nilai IKS Kecamatan Samboja Barat 2025.....	
Tabel 3.6 Capaian Stunting Kecamatan Samboja Barat	
Tabel 3.7 Capaian Angka Kematian Ibu Kecamatan Samboja Barat	
Tabel 3.8 Capaian Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan Kecamatan Samboja Barat.....	
Tabel 3.9 Capaian Posyandu Aktif	
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program Kecamatan Samboja Barat 2025.....	
Tabel 3.11 Jenis Layanan PATEN Kecamatan Samboja Barat	
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kecamatan Samboja Barat 2025	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administratif Kecamatan Samboja Barat	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Samboja Barat	3
Gambar 3.1 Surat Pernyataan Camat Tidak Adanya Keluhan Terhadap Layanan Publik	
Gambar 3.2 Dokumentasi Laporan Keuangan Samboja Barat 2025	
Gambar 3.3 Dokumentasi Rekapitulasi Barang daKe Neraca Samboja Barat 2025	
Gambar 3.4 Dokumentasi Perjanjian LHKPN	
Gambar 3.5 Dokumentasi Nilai Tata Kelola Arsip Kecamatan Samboja Barat	
Gambar 3.6 Dokumentasi Keterisian Input e-Pantau 2025.....	
Gambar 3.7 Dokumentasi Inovasi.....	
Gambar 3.8 CALK Samboja Barat 2025	
Gambar 3.9 Indikator Penilaian IKS.....	
Gambar 3.10 Kawasan Tanpa Rokok	
Gambar 3.1 Surat Pernyataan Camat Tidak Adanya Keluhan Terhadap Layanan Publik	
Gambar 3.2 Dokumentasi Laporan Keuangan Samboja Barat 2025	
Gambar 3.3 Dokumentasi Rekapitulasi Barang daKe Neraca Samboja Barat 2025	
Gambar 3.4 Dokumentasi Perjanjian LHKPN	
Gambar 3.5 Dokumentasi Nilai Tata Kelola Arsip Kecamatan Samboja Barat	
Gambar 3.6 Dokumentasi Keterisian Input e-Pantau 2025.....	
Gambar 3.7 Dokumentasi Inovasi.....	
Gambar 3.8 CALK Samboja Barat 2025	
Gambar 3.9 Indikator Penilaian IKS.....	
Gambar 3.10 Kawasan Tanpa Rokok	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik yang merupakan tugas dan fungsi utama Kecamatan sampai saat ini masih memiliki tantangan tersendiri. Percepatan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai core bisnis Kecamatan terus dilakukan. Langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan akuntabilitas kinerja yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Samboja Barat sebagai Perangkat Daerah menerjemahkan dan mewujudkan penyelenggaraan SAKIP melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK) 2025, LKjIP 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 diharapkan dapat:

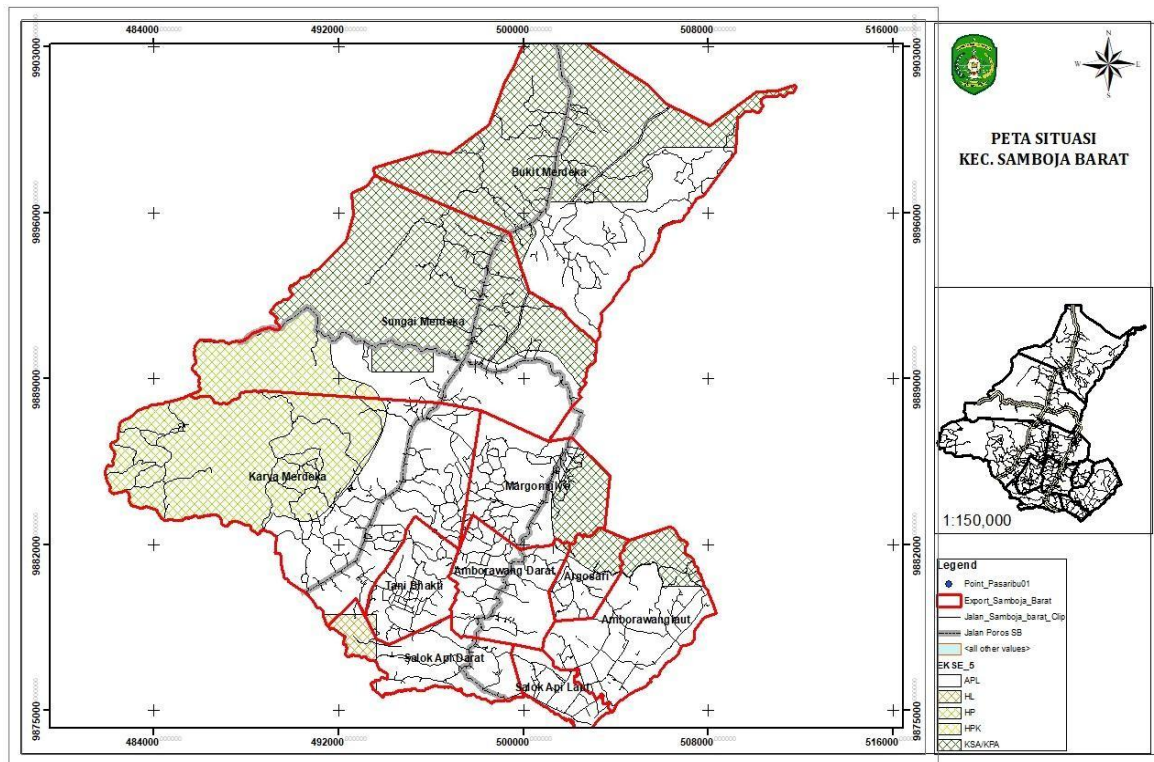


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat.
2. Mendorong peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Samboja Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bingkai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap terhadap setiap layanan yang dilaksanakan Kecamatan Samboja Barat.

1.2 Gambar Umum

Kecamatan Samboja Barat merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas wilayah mencapai 1.462,58 km². Secara geografis wilayah ini dilintasi Garis Katulistiwa, terletak pada posisi antara 116° 915' BT – 117° 026' BT dan 0° 39' LU – 1° 114' LS. Secara administratif, Kecamatan Samboja Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu di bagian utara, Selat Makassar di bagian timur, Kota Balikpapan di bagian selatan, serta Kabupaten Panajam Pasir Utara di bagian barat.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administratif Kecamatan Samboja Barat



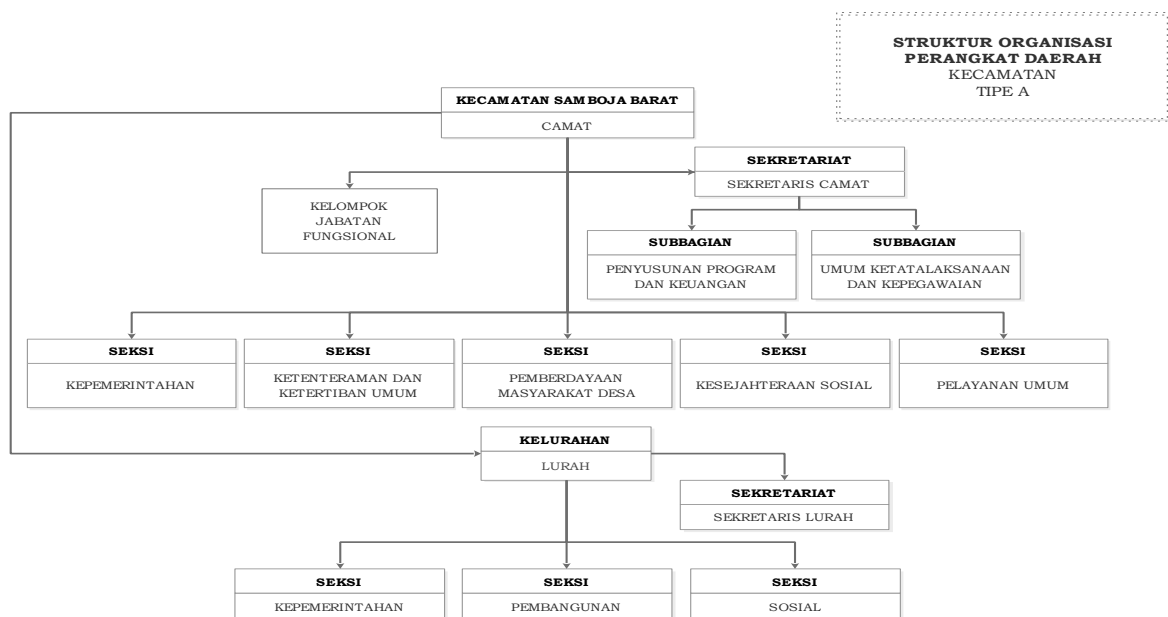


Kecamatan Samboja Barat memiliki jumlah penduduk mencapai 31.300 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 9.751 di tahun 2025 yang tersebar di 9 Kelurahan dan 1 desa, yang terdiri dari Laki – Laki sebanyak 16.634 jiwa perempuan sebanyak 14.666 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 12 penduduk per km², dengan sumber mata pencaharaian dari sektor perikanan, pertanian dan perkebunan. Potensi Samboja Barat selain perikanan, pertanian dan perkebunan ada pada sektor pariwisata..

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Samboja Barat





Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Lurah
 - a. Sekretaris Lurah
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Pembangunan
 - d. Seksi Sosial

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Samboja Barat sebagai berikut:

- ✓ Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- ✓ Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- ✓ Mengkomunikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat



- ✓ Mengkomunikasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- ✓ Mengkomunikasikan penerapan dan penegakan peraturan wilayah provinsi, Gubernur dan peraturan bupati
- ✓ Mengkomunikasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- ✓ Mengkomunikasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- ✓ Melaksanakan urusan pemerintah dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa
- ✓ Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- ✓ Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

1.5 Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Samboja Barat memiliki 151 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jenjang pendidikan, kepangkatan, jenis kelamin secara rinci disampaikan dalam tabel di bawah:

Tabel 1.1 Keadaan ASN Kecamatan Samboja Barat

No	Jenjang Pendidikan	Pangkat / Gol. Ruang				Status ASN		Jenis Kelamin	
		IV	III	II	I	PNS	PPPK	L	P
1	SD	-	-	-	1	1	3	4	-
2	SLTP	-	-	1	2	3	8	11	1
3	SMA	-	-	21	-	21	43	24	20
4	D3	-	1	3	-	4	3	3	4
5	S1	-	33	3	-	34	21	35	19
6	S2	8	-	-	-	8	-	8	-
Jumlah		8	34	28	3	77	78	85	44



1.6 Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2025 Alokasi Anggaran Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp. 98.181.028.175,00. Alokasi anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan.

1.7 Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat memiliki dinamika yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi selalu dinamis menurut masanya, sehingga Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Samboja Barat harus sigap dan dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif.

Proses pelaksanaan tugas dan fungsi, selalu diawali dengan tahapan perencanaan. Kemampuan merumuskan isu-isu strategis untuk diantisipasi dan dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kualitas perencanaan. Isu-isu strategis yang dapat dirumuskan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat sebagai berikut:

- ✓ Kemudahan dan Keterjangkauan Layanan.
- ✓ Kemiskinan.
- ✓ Aksesibilitas antar Wilayah
- ✓ Kepastian Hukum (tumpang Tindih dan Sengketa Lahan).
- ✓ Pembangunan IKN.
- ✓ Teknologi dan Kualitas SDM.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



1. Kata Pengantar
2. Ikhtisar Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar Gambar
6. Bab I Pendahuluan
7. Bab II Perencanaan Kinerja
8. Bab III Akuntabilitas Kinerja Bab
9. IV Penutup
10. Lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam satu rangkaian proses mengidentifikasi tujuan, menetapkan Standar Kinerja, mengembangkan Rencana Aksi, menetapkan Indikator Tujuan guna mengelola dan mengarahkan kinerja organisasi secara efektif.

Perangkat Daerah sebagai sebuah organisasi menyusun perencanaan kinerja sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja Barat 2021 -2026 merupakan perwujudan perencanaan kinerja dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, menjabarkan tentang visi misi Kepala Daerah, serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan Kecamatan Samboja Barat.

2.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Rumusan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Samboja Barat merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**, Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 Misi, yaitu:

- Misi 1** : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani
- Misi 2** : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
- Misi 3** : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- Misi 4** : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
- Misi 5** : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan



Dari ke 5 (lima) Misi tersebut diatas, yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Samboja Barat adalah **Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.**

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Samboja Barat periode 2021-2026 dalam mewujudkan Misi ke -1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani secara lebih detail disampaikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2.1 Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis, diperlukan Strategi dan Kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.



Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Samboja Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S - O (*Strengths - Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Samboja Barat Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang, seperti pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia																									
<table border="1" style="float: right; margin-left: auto;"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>						2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	4	5	6
2	2	2	2	2																					
0	0	0	0	0																					
2	2	2	2	2																					
2	3	4	5	6																					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel .	1	Meningkatkan ya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis Teknologi	1.	Pelayanan Jemput Bola.	-	-	√	√	√													
						2.	Pemberian Layanan Berbiaya Murah / Gratis berbasis aplikasi.	√	√	√	√	√													
						3.	Pelatihan Petugas Layanan	-	√	√	√	-													
			2	Koordinasi Secara Reguler dengan Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kecamatan		4.	Pembentukan dan Pelaksanaan Forum Koordinasi	√	√	√	√	√													



3	Peningkatan Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa	5	Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Desa seperti, BUMDES dan Kooperasi dan UMKM Desa.	✓	✓	✓	✓	✓
4	Optimalisasi Potensi Wisata	6	Peningkatan Sarana Prasarana Museum Mulawaraman	✓	✓	✓	✓	✓
		7	Mendorong Peran Elemen Masyarakat terlibat dalam POKDARWIS	✓	✓	✓	✓	✓

2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahapan pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, disusun program yang memuat Kegiatan atau rangkaian kegiatan dan Sub Kegiatan. Program yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Kecamatan Samboja Barat telah tersedia dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dijabarkan dalam KepMen Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Matrik hubungan antara sasaran strategis dengan program disampaikan dalam tabel di bawah:

Tabel 2.3 Matrik Hubungan antara sasaran strategis dengan Program Tahun 2025

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pilihan Kecamatan Samboja Barat pada tahun 2025, lebih rinci tercantum pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	SATUAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Nilai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2	dokumen
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	laporan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dokumen



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	SATUAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	7	laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	orang
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	2	laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Laporan Keuangan	1	laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1030	unit
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	23	orang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	6	Layanan



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	SATUAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	59	Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	107	Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	202	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	79	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	718	Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	52	unit
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51	unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1584	laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	150	unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	SATUAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	75	Persen
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	Persen
Koorinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koorinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Laporan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1	Kegiatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4	Laporan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	308	Laporan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	727	Persen
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Kegiatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Laporan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	80	Kegiatan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2	Laporan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10	Laporan



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	SATUAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Laporan
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3	Laporan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	41	Kali
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	14	laporan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1	laporan
Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1	laporan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	89	Persentase
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	laporan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN KETERTIBAN UMUM	89	Persentase
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	laporan

2.5 Perjanjian Kinerja

Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana, Evaluasi pelaksanaan rencana.



Pada tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, disusun Perjanjian Kinerja dalam pencapaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara terstruktur dan berjenjang antara Kepala Daerah sampai pada Level Pelaksana. Materi Perjanjian Kinerja Antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Perangkat Daerah pada level Dampak, Pimpinan Perangkat Daerah Dengan Pejabat Eselon III pada Level Outcome, Eselon III dengan Eselon IV pada Level Output.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Camat Samboja Barat merupakan Perjanjian Kinerja Organisasi (Kecamatan Samboja Barat) dan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja pada seluruh ASN Kecamatan Samboja Barat. Perjanjian Kinerja Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	90
		Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80
2	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat Dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3	Menigkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasi Temuan BPK Atas Audit LKPD Tahun Sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah	Level	3
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengadaan SP4N Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterinputan Data Pada Satu Data Indonesia	Persen	100



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
9	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	Laporan	48
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11	Meningkatkan Manajemen Birokrasi Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun Anggaran 2025, Kecamatan Samboja Barat mendapatkan alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD dan DAU sebesar **Rp. 107.900.988.043,-** dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2025 yang bersumber dari APBD dan DAU mengalami penurunan/pemangkasan anggaran meningkat sebesar **Rp. 9.719.959.868,-**, sehingga alokasi anggaran Kecamatan Samboja Barat menjadi **Rp. 98.181.028.175,-**. Rincian alokasi anggaran Kantor Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 lebih detail disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025

Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Kecamatan Samboja Barat		107,900,988,043	98,181,028,175	(9,719,959,868)
Kecamatan Samboja Barat		98,005,226,043	89,444,067,875	(8,561,158,168)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
7.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,000,000	66,275,400	(73,724,600)
7.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,000,000	2,500,000	(2,500,000)
7.01.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,000,000	2,500,000	(2,500,000)
7.01.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70,000,000	36,850,000	(33,150,000)
7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,000,000	30,000,000	(30,000,000)
7.01.01.2 .01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data	300,000,000	138,902,400	(161,097,600)



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
	Statistik Sektor Daerah			
7.01.01.2 .01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	12,500,000	(12,500,000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7.01.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,998,789,696	14,712,182,010	(4,286,607,686)
7.01.01.2.02.0 004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		49,862,000	49,862,000
7.01.01.2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,000,000	12,500,000	(12,500,000)
7.01.01.2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	444,000,000	444,000,000	0
7.01.01.2.02.0 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25,000,000	12,500,000	(12,500,000)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
7.01.01.2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000	12,500,000	(12,500,000)
7.01.01.2.03.0 002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150,000,000	89,192,000	(60,808,000)
7.01.01.2.03.0 003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50,000,000	21,305,000	(28,695,000)
7.01.01.2.03.0 005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,800,000	40,800,000	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7.01.01.2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	193,494,000	0	(193,494,000)
7.01.01.2.05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50,000,000	0	(50,000,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi	28,838,000	28,838,000	0



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266,252,000	133,528,400	(132,723,600)
7.01.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,457,000	16,457,000	0
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	115,130,000	(34,870,000)
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142,386,000	115,860,000	(26,526,000)
7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450,000,000	405,719,400	(44,280,600)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204,000,000	78,970,000	(125,030,000)
7.01.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,000,000	75,000,000	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,749,000	33,749,000	0
7.01.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	676,598,777	676,598,777	0
7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,381,390,820	983,469,572	(397,921,248)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000	50,000,000	0
7.01.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,200,000	40,200,000	0
7.01.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabi- litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	0	(100,000,000)
7.01.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabi- litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	0	(50,000,000)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.0 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	150,000,000	86,780,000	(63,220,000)



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	350,000,000	334,613,000	(15,387,000)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
7.01.02.2.02.002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
7.01.02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	817,870,750	747,870,750	(70,000,000)
7.01.02.2.04.003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	57,915,000,000	55,315,000,000	(2,600,000,000)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
7.01.03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	185,000,000	185,000,000	0
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,000,000	25,000,000	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50,000,000	50,000,000	0
7.01.03.2.02.004	Evaluasi Kelurahan	50,000,000	43,322,000	(6,678,000)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7.01.03.2.03.001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	13,605,400,000	13,588,593,166	(16,806,834)



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	50,000,000	0
7.01.03.2.03.003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	150,000,000	50,000,000	(100,000,000)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	175,000,000	175,000,000	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
7.01.05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200,000,000	350,000,000	150,000,000
Kelurahan Margomulyo		1,120,000,000	974,491,500	(145,508,500)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35,000,000	0	(35,000,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,380,000	1,380,000	0
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,015,000	7,007,500	(7,007,500)
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,866,000	7,433,000	(7,433,000)
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,728,000	0	(1,728,000)
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,000,000	72,160,000	8,160,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,911,000	34,911,000	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,100,000	1,100,000	0



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000	3,000,000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	792,650,000	142,650,000
7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	54,850,000	(245,150,000)
Kelurahan Argosari		1,140,000,000	940,035,000	(199,965,000)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,000,000	11,000,000	(11,000,000)
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,770,000	6,885,000	(6,885,000)
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,540,000	0	(1,540,000)
7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,990,000	60,990,000	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,800,000	0	(64,800,000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,900,000	1,900,000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5,000,000	2,500,000	(2,500,000)
7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	725,440,000	75,440,000
7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	131,320,000	(168,680,000)
7.01.03.2.02.0 004	Evaluasi Kelurahan	20,000,000	0	(20,000,000)
Kelurahan Amborawang Darat		1,122,543,000	1,062,683,320	(59,859,680)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi	3,072,700	5,112,700	2,040,000



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	13,204,500	(1,795,500)
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,712,000	16,512,000	1,800,000
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,900,300	1,560,120	(2,340,180)
7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42,800,000	38,054,000	(4,746,000)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	20,000,000	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,158,000	4,158,000	0
7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,060,000	6,060,000	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,840,000	2,840,000	0
7.01.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabi- litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,000,000	57,960,000	(2,040,000)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	637,600,000	(12,400,000)
7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	259,622,000	(40,378,000)
Kelurahan Amborawang Laut		1,080,000,000	1,021,728,080	(58,271,920)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,252,300	1,252,300	0
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	6,616,500	(3,383,500)
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,394,000	10,574,000	(820,000)
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,512,700	1,204,280	(3,308,420)
7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,240,000	41,240,000	0



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	891,000	891,000	0
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,260,000	7,260,000	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,050,000	3,050,000	0
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,400,000	50,400,000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	650,000,000	0
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	249,240,000	(50,760,000)
Kelurahan Salok Api Darat		1,080,000,000	1,012,898,900	(67,101,100)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	5,503,500	(4,496,500)
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,527,000	8,527,000	0
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,004,000	2,407,900	(4,596,100)
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,200,000	55,200,000	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000	3,030,000	(36,970,000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,200,000	2,200,000	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,069,000	7,069,000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	650,000,000	0
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	278,961,500	(21,038,500)
Kelurahan Salok Api Laut		1,091,299,000	915,945,000	(175,354,000)



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7.01.01.2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20,000,000	0	(20,000,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,400,000	2,400,000	0
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,139,000	0	(1,139,000)
7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,800,000	54,800,000	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000	0	(35,000,000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,700,000	1,700,000	0
7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,260,000	7,260,000	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,000,000	4,000,000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	650,000,000	0
7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	180,785,000	(119,215,000)
Kelurahan Karya Merdeka		1,104,000,000	996,632,000	(107,368,000)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7.01.01.2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24,000,000	12,264,000	(11,736,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,554,000	1,554,000	0



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,455,000	7,926,500	(9,528,500)
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,244,000	0	(7,244,000)
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,500,000	500,000	(1,000,000)
7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,030,000	55,030,000	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,057,000	12,873,000	(27,184,000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,100,000	1,100,000	0
7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,060,000	6,060,000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	643,950,000	(6,050,000)
7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	255,374,500	(44,625,500)
Kelurahan Sungai Merdeka		1,080,000,000	934,690,000	(145,310,000)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	7,500,000	(7,500,000)
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,000,000	800,000	(1,200,000)
7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,000,000	78,120,000	16,120,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000	40,000,000	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1,000,000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	751,340,000	101,340,000



Uraian		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	50,930,000	(249,070,000)
Kelurahan Bukit Merdeka		1,077,920,000	877,856,500	(200,063,500)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,700,000	2,850,000	(2,850,000)
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,677,000	7,838,500	(7,838,500)
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,853,000	0	(1,853,000)
7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32,100,000	32,100,000	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,040,000	15,913,000	(56,127,000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550,000	550,000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	650,000,000	637,375,000	(12,625,000)
7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300,000,000	181,230,000	(118,770,000)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Samboja Barat wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja).

Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.



Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja Kecamatan Samboja Barat, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya. Pengukuran kinerja Kecamatan Samboja Barat tahun 2025 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam kontrak kinerja tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Samboja Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus, yaitu:

- Rumus Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Rumus Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Kinerja Kecamatan Samboja Barat berdasarkan dokumen renstra dan renja tahun 2025 yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh Camat Samboja Barat dan disetujui oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 31 Januari 2024 di Tenggarong, diukur berdasarkan capaian kinerja pada 20 (dua puluh) sasaran dan 18 indikator kinerja. Keduapuluh sasaran tersebut, yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan, (2) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan, (3) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan, (4) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan, (5) Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, (6) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (7) Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (8) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (9) Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah, (10) Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor, (11) Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, (12) Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah, (13) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (14) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (15) Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani, (16) Meningkatnya Inovasi Daerah, (17) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, (18) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Capaian kinerja Kecamatan Samboja Barat tahun 2025 berdasarkan kontrak kinerja disajikan pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Samboja Barat berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	6.5	26.67	410.31	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wis	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	0	0	-
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0	Sangat Rendah
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	96.17	108.91	Sangat Tinggi
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100	Sangat Tinggi



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KRITERIA
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.7	3.2568	88.02	Tinggi
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65.92	85.61	Tinggi
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	100	100	100.00	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52.56	59.81	113.79	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	94.46	104.96	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100.00	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.2, dari 20 indikator kinerja sebanyak 17 indikator mencapai predikat "Sedang", terdiri dari 17 indikator atau 75 persen mencapai target kinerja 100 persen, 1 indikator melampaui target kinerja sebesar 143 persen. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja masing-masing sasaran yang diukur dengan 25 indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan**

1.1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik



yang ada di kecamatan.

Target indikator kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% atau sangat tinggi. Faktor pendukung dari capaian ini adalah petugas pelayanan bisa melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang masih ada adalah sarana dan prasarana pendukung pelayanan kurang lengkap.

1.2. **Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Salah satu fungsi utama kecamatan adalah Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Target indikator kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% atau sangat tinggi. Faktor pendukung capaian ini adalah kesadaran masyarakat dalam rangka ikut serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya masing-masing, sehingga meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

1.3. **Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa**

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan 0 Persen artinya tidak ada realiasi. Angka realisasi ini tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, melainkan tidak tersedianya data realisasi PAD di kecamatan Samboja Barat. Keadaan ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi dengan Bapenda Kutai Kartanegara selaku perangkat daerah pengelola PAD serta juga kebijakan terhadap kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap objek PAD tertentu. Pada masa yang akan datang diperlukan penguatan koordinasi agar PAD dari kecamatan Samboja Barat dapat dilaporkan.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TANI BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2026			
Jenis APBDes : DRAFT AWAL			
Sumberdana : PAD			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN { Rp }	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.000.000,00	
5.	BELANJA		
5.	<u>BIDANG PERYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	4.000.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.000.000,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	4.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	4.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tani Bhakti, 11 Januari 2026
Kepala Desa

2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah kegiatan dialog dan diskusi antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. FKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2025 Kecamatan Samboja Barat belum melaksanakan Forum Konsultasi Publik.

Target Indikator Kinerja Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan target 100% terealisasi 0% sehingga capaian kinerjanya mencapai 0% atau sangat rendah.

3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh



pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Target indikator kinerja IKM Kecamatan samboja Barat pada tahun 2025 dengan nilai 88,3 dan dapat terealisasi dengan nilai 95,77 sehingga capaian kerjanya mencapai 108,46% atau sangat tinggi.

4. **Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Target Indikator Kinerja Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir dengan target 100% dapat terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya mencapai 100% atau sangat tinggi.

Dari hasil audit Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kecamatan Samboja Barat tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, sampai saat ini belum ada hasil temuan yang harus ditindak lanjuti;

5. **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

SPIP merupakan sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan, menjamin keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Target Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah dengan target nilai 3 dapat terealisasi nilai 3 sehingga capaian kerjanya mencapai 100% atau sangat tinggi. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak ada lagi nilai maturitas SPIP OPD tetapi nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah.

6. **Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Riset Daerah pada tahun 2025 mengadakan pekan inovasi dan kreativitas dengan tema “Inovasi dan Kreativitas Untuk Akselerasi pencapaian Kukar Idaman Terbaik” yang bertujuan agar tercipta perubahan-perubahan menuju tradisi, pola, dan cara



baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency One Innovation) yang mewajibkan 1 (satu) Perangkat Daerah atau Unit Kerja untuk menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahunnya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Target indikator kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah dengan target 1 inovasi dapat tidak terealisasi, sehingga capaian kinerjanya 0% atau sangat rendah.

7. **Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor**

SP4N-LAPOR adalah layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik di Indonesia.

SP4N-LAPOR merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Target indikator kinerja Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor dengan target 100% dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau sangat tinggi.

8. **Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia**

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar-instansi pusat maupun daerah.

Target Indikator Kinerja Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia dengan target 100% dapat tidak terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 0% atau sangat rendah.

9. **Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah**

Gerakan Etam Mengaji (GEMA) adalah program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang bertujuan memasyarakatkan Al-Qur'an dan membangun karakter religius di seluruh lapisan masyarakat serta lingkungan kerja.

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" dengan target 48 (empat puluh delapan) Laporan, sudah terealisasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) laporan, sehingga capaian kinerjanya 100% atau sangat tinggi.



10. **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

LPPD merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini berisi capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Tujuan LPPD Mencerminkan ketinggian atau tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sebagai perwujudan akuntabilitas, Sebagai pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Target indikator kinerja Nilai LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dengan target nilai 3,7 terealisasi dengan nilai 3,2568 sehingga capaian kerjanya mencapai 88,02% atau tinggi.

11. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa nilai sebesar 65,92 dengan predikat "B".

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagai unit kerja utama, namun masih perlu adanya upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Target indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada tahun 2025 dengan nilai 77 dapat terealisasi dengan nilai 65,92 sehingga capaian kerjanya sebesar 85,61% atau tinggi.

12. **Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani**

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan di instansi pusat maupun daerah. Pada tahun 2024-2025, fokus penilaian bergeser pada RB Tematik atau "RB Berdampak" yang mengukur kontribusi nyata pemerintah terhadap masalah makro seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.

Target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten pada tahun 2025 sebesar 100% dapat terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya mencapai 100% atau sangat tinggi.



13. **Meningkatnya Inovasi Daerah**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan skor indeks 59,81 dengan predikat “inovatif”, meningkat dari pencapaian tahun lalu yang mendapatkan skor indeks 58,59.

Target indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 dengan skor indeks sebesar 52,56 dapat terealisasi dengan skor indeks 59,81 sehingga capaian kinerjanya mencapai 113,79% atau sangat tinggi.

14. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra Republik Indonesia tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 4,35 (dengan skala 1-5), jika dikonversikan dengan skala 1-10 maka nilainya 8,7 atau kategori (A-).

Target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah pada tahun 2025 sebesar 90 dapat terealisasi 94,46 sehingga capaian kinerjanya hanya 104,96% atau sangat tinggi.

15. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Berdasarkan Keputusan Ombudsman Republik Indonesia tentang Hasil Penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan pelayanan Publik), Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 94,46, zona hijau, kategori A, opini Kualitas Tertinggi.

Target indikator kinerja Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah pada tahun 2025 adalah zona hijau dan dapat terealisasi dengan zona hijau, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau sangat tinggi.

3.2 Realisasi Anggaran



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat tahun 2025 merupakan dokumen informasi proses pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap tugas dan fungsi organisasi sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana Kecamatan Samboja Barat merupakan salah satu entitas yang tak terpisahkan dari Instansi Pemerintah.

4.2 Saran

Dalam proses penyusunan LKjIP Kecamatan Samboja Barat, ditemukan kesulitan dalam menyajikan analisis menyeluruh karena keterbatasan informasi sehingga berdampak pada kualitas laporan, sehingga untuk peningkatan kualitas laporan pada periode selanjutnya disarankan agar indikator kinerja yang sumber datanya dari perangkat daerah lain sebaiknya tidak menjadi objek pelaporan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Samboja Barat, 12 Februari 2026

Camat,



H. BURHANUDDIN, S.Ag., M.Si

Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 19710330 199702 1 001



BAB V LAMPIRAN